



**P U T U S A N**

**Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROSITA ULISORMIN, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Asem Raya Nomor 22A, RT.007/RW.001, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vence Titawael, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 3, RT.001/RW.015, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT.LIBRINDAH RIMBAJATI, berkedudukan di Jalan Rawa Selatan I Nomor 407 RT.009/RW.007, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur, Hendry Chandra, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehat Damanik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Plaza Pupuk Kaltim, Gedung B, Lantai 1, Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 6a, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap pada Tergugat terhitung sejak 1 September 1997 dengan menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Administrasi *Finance* dan *Accounting* serta memperoleh upah/gaji awal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan upah/gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu

Hal. 1 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



rupiah) setiap bulannya, dimana hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Lisan (tidak tertulis), oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”) *jo.* Pasal 51 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13/2003 berbunyi:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”;

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

“Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

“Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan”;

- 2 Bahwa awalnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, dimana Penggugat selaku karyawan tetap telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan jujur, yakni mendedikasikan tenaga, waktu dan pikiran bahkan memberikan sumbangsih/kontribusi, sehingga berdampak pada perkembangan dan keuntungan Tergugat, hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah karyawan Tergugat yang sampai saat ini telah mencapai  $\pm 70$  (tujuh puluh) orang karyawan, padahal awalnya karyawan Tergugat hanya terdiri dari Penggugat beserta  $\pm 30$  (tiga puluh) orang karyawan saja;
- 3 Bahwa oleh karenanya Tergugat telah memberikan apresiasi atas kinerja Penggugat dengan menaikkan upah/gaji Penggugat secara bertahap yang awalnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya menjadi sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, bahkan sejak tahun 2000 Penggugat dipercayakan oleh Tergugat untuk menduduki jabatan penting dalam struktur Tergugat, yakni sebagai Kepala Bagian Administrasi *Finance* dan *Accounting*, di mana Penggugat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran telah mengemban kepercayaan Tergugat tersebut, hal tersebut terbukti hingga saat ini tidak pernah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat yang mengakibatkan kerugian Tergugat;
- 4 Bahwa berawal dari hubungan internal pada bagian *Finance* dan *Accounting* yang dipimpin oleh Penggugat mengalami kekurangharmonisan, yakni sekitar akhir tahun 2012 karena salah satu bawahan Penggugat, yakni Sdri.Yani tidak dapat bekerja



sama baik dengan Penggugat bahkan tidak menghargai Penggugat sebagai atasannya, padahal penempatan Sdri.Yani sebagai bawahan Penggugat pada bagian *Finance* dan *Accounting* merupakan kebijakan dari Tergugat, di mana sebelum menempatkan seseorang menjadi bawahan Penggugat seharusnya Tergugat memperhatikan dan mempertimbangkan apakah orang yang akan ditempatkan menjadi bawahan Penggugat tersebut merupakan orang yang tepat untuk membantu dan bekerja sama dengan Penggugat atau tidak, demikian juga Tergugat seharusnya melakukan pembinaan bagi orang yang hendak ditempatkan menjadi bawahan Penggugat tentang bagaimana bersikap dan bertindak secara professional sebagai bawahan Penggugat;

- 5 Bahwa karena kondisi kekurangharmonisan tersebut, maka sekitar pada tanggal 11 Januari 2013, tiba-tiba Penggugat dipanggil oleh Tergugat, dimana saat itu Tergugat secara lisan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) terhadap Penggugat dan sebagai kompensasi dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Tergugat menawarkan untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) bulan upah/gaji kepada Penggugat;
- 6 Bahwa mendengar PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta jumlah kompensasi PHK yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pada saat itu Penggugat menyampaikan agar Tergugat mempertimbangkan kompensasi PHK disesuaikan dengan masa kerja Penggugat pada Tergugat yang telah mencapai lebih dari 15 (lima belas) tahun, sehingga Tergugat menaikkan penawaran kompensasi PHK kepada Penggugat menjadi sebesar 7 (tujuh) bulan upah/gaji Penggugat;
- 7 Bahwa penawaran-penawaran kompensasi PHK yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan penawaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penawaran Tergugat tersebut merupakan bentuk dari ketidakpenghargaan Tergugat atas semua pengorbanan dan dedikasi Penggugat selama lebih dari 15 (lima belas) tahun bekerja pada Tergugat, oleh karenanya Penggugat secara tegas menolak kompensasi PHK yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut;
- 8 Bahwa walaupun belum ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat mengenai PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat beserta besarnya kompensasi PHK yang diterima oleh Penggugat atas PHK lisan tersebut, namun Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik dan jujur, sebaliknya Tergugat justru menunjukkan keseriusan untuk melakukan PHK terhadap



Penggugat dengan menempatkan karyawan baru untuk menggantikan posisi/jabatan Peggugat, bahkan ketika Tergugat meminta Peggugat untuk mengajarkan dan/atau melakukan *training* kepada karyawan baru tersebut, maka sebagai bentuk tanggung jawab terakhir Peggugat kepada Tergugat dan dalam rangka menggugah perasaan Tergugat untuk memberikan kompensasi PHK kepada Peggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peggugat menuruti atau setidaknya tidaknya melaksanakan permintaan Tergugat tersebut, yakni Peggugat melakukan *training* kepada karyawan baru yang menggantikan posisinya tersebut;

- 9 Bahwa ironisnya Tergugat justru bersikap arogan ketika Peggugat meminta surat PHK kepada Tergugat karena Tergugat tidak memberikan surat PHK tersebut kepada Peggugat bahkan dengan segala daya upaya telah dilakukan Tergugat untuk memaksa secara halus agar Peggugat menerima kompensasi PHK lisan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Peggugat sebesar 7 (tujuh) bulan upah/gaji, maka Tergugat sengaja untuk menempatkan atau menyuruh Peggugat untuk menempati ruang *meeting*/ pertemuan tanpa memberikan satupun pekerjaan kepada Peggugat, namun Peggugat tetap pada sikap dan keputusan semula, yakni tidak menerima penawaran kompensasi PHK dari Tergugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, di mana ironisnya Tergugat justru sama sekali tidak memberikan kompensasi PHK kepada Peggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut haruslah dikualifisir sebagai tindakan yang sewenang-wenang;
- 10 Bahwa dengan demikian, secara hukum telah terjadi perselisihan PHK antara Tergugat dengan Peggugat akibat tidak adanya kesesuaian pendapat antara Peggugat dengan Tergugat tentang PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Peggugat dan tidak adanya kesesuaian pendapat sehubungan dengan jumlah pesangon dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Peggugat dari Tergugat akibat PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat;
- 11 Bahwa selain itu ternyata selama lebih dari 15 (lima belas) tahun Peggugat bekerja sebagai karyawan tetap Tergugat, faktanya Peggugat sama sekali tidak mendapatkan salah satu hak normatifnya, yakni hak Peggugat atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992”), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3/1992 *jo.* Pasal 2 ayat (3) Peraturan





Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993”) *jo.* Pasal 13 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004”), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 berbunyi:

“(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi;

(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 berbunyi:

“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”;

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 berbunyi:

“Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja”;

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 berbunyi:

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenagakerjanya dalam program jaminan sosial tenagakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”;

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berbunyi:

“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”;

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berbunyi:

“Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a Jaminan kesehatan;
- b Jaminan kecelakaan kerja;
- c Jaminan hari tua;
- d Jaminan pensiun; dan
- e Jaminan kematian;”

12 Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jamsostek atau Program Jaminan Sosial merupakan



tindakan yang tidak taat dan tidak patuh atau setidak-tidaknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan tindakan sewenang-wenang karena Tergugat hanya mengejar keuntungan Tergugat semata tanpa memperhatikan kesejahteraan atau jaminan kesejahteraan Penggugat sebagai karyawan;

13 Bahwa karena Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum Tergugat dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 *jo.* Pasal 47 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berbunyi:

- “(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan”;

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenagakerja, dan badan penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”;

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang berbunyi:

“Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagaakerja, maka:

- a Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1), dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar;
- c Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan”;
- 14 Bahwa dengan demikian secara hukum telah terjadi perselisihan hak karena tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan hak normatif Penggugat untuk mendapatkan Jamsostek atau diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- 15 Bahwa karena telah terjadi Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK, maka sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”), maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya Bipartit dengan Tergugat sebagaimana berupa komunikasi dan/atau korespondensi antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
- 1 Surat Kuasa Penggugat Nomor 002/Per/VMH&R/II/2013, tertanggal 5 Februari 2013, Perihal: Peringatan dan Undangan;
  - 2 Surat Kuasa Penggugat Nomor 005/Per/VMH&R/II/2013, tertanggal 11 Februari 2013, Perihal: Peringatan Ke-2 (dua);
- 16 Bahwa berdasarkan korespondensi/komunikasi antara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Tergugat dan/atau Kuasa Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemui kata sepakat karena Tergugat hanya bersedia memberikan kompensasi PHK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas tindakan PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, di mana atas penawaran Tergugat tersebut telah ditolak dengan tegas oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 17 Bahwa walaupun telah terjadi perundingan bipartit dalam rangka mencari solusi terbaik atas Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat dan tidak ditemui kata sepakat, namun ternyata Tergugat telah melakukan upaya-upaya untuk menghindar dari tanggung jawabnya untuk membayar

Hal. 7 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi PHK kepada Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana hal tersebut terbukti dengan cara Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Masuk Kerja kepada Penggugat sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 26 Februari 2013 (Bukti P-1), sehingga seolah-olah tidak ada terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat dengan Penggugat, di mana faktanya Surat Tergugat (*vide* Bukti P-1) tersebut sama sekali tidak diterima oleh Penggugat, melainkan hanya kuasa hukum Penggugat saja yang menerima tembusan surat Tergugat (*vide* Bukti P-1) tersebut, di mana selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat membalas surat Tergugat (*vide* Bukti P-1) tersebut sebagaimana Surat Kuasa Penggugat Nomor 013/Srt/VMH&R/III/2013, tertanggal 4 Maret 2013, Perihal: Tanggapan Surat PT.LIBRINDAH RIMBAJATI tertanggal 26 Februari 2013 (Bukti P-2);

18 Bahwa selanjutnya Tergugat kembali melakukan Panggilan Masuk Kerja Kedua kepada Penggugat sebagaimana Surat Tergugat tertanggal 7 Maret 2013 (Bukti P-3), sama seperti surat Tergugat yang pertama (*vide* Bukti P-1), maka surat Tergugat yang kedua (*vide* Bukti P-3) pun sama sekali tidak diterima oleh Penggugat, melainkan hanya Kuasa Penggugat yang menerima tembusan surat Tergugat (*vide* Bukti P-3) tersebut, kemudian Kuasa Penggugat telah membalas surat Tergugat (*vide* Bukti P-3) tersebut sebagaimana Surat Kuasa Penggugat Nomor 014/Srt/VMH&R/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013, Perihal: Tanggapan Surat PT.LIBRINDAH RIMBAJATI tertanggal 7 Maret 2013 (Bukti P-4);

19 Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan hak normatif Penggugat untuk mendapatkan Jamsostek atau diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menempuh upaya hukum dengan melaporkan/mengadukan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Up. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil ("PPNS") Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana surat Kuasa Penggugat Nomor 011/Srt/VMH&R/II/2013, tertanggal 27 Februari 2013, Perihal: Laporan/Pengaduan Atas Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan (Bukti P-5), dimana selanjutnya Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, maka



telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Laporan/Pengaduan Penggugat tersebut telah ditingkatkan ke proses penyidikan sebagaimana Laporan Kejadian Nomor LK-05/VII/2013/PPNS-Sudin Nakertrans, tanggal 10 Juli 2013, di mana pada tanggal 15 Juli 2013 Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana Surat Panggilan Nomor 029/SPS/I-VII/2013/PPNS-Sudin Nakertrans, tanggal 15 Juli 2013 (Bukti P-6);

- 20 Bahwa ternyata Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial, yakni Perselisihan Hak maupun Perselisihan PHK secara kekeluargaan, sehingga pada akhirnya Penggugat mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut kepada Suku Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana Surat Kuasa Penggugat Nomor 015/Srt/VMH&R/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013, Perihal: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Bukti P-7A dan Bukti P-7B);
- 21 Bahwa Penggugat merasakan dan mengalami adanya ketidakprofesionalan Mediator pada Suku Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam proses Mediasi karena Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator sebagaimana Surat Nomor 723/-1.8351, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal: Anjuran (Bukti P-8) merupakan Anjuran yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses mediasi karena Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator lebih menguntungkan Tergugat, sehingga terhadap proses maupun hasil mediasi tersebut, Penggugat telah mengadukan Mediator kepada Kepala Inspektorat Propinsi DKI Jakarta dan Kepala Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana Surat Kuasa Penggugat Nomor 030/Srt/VMH&R/VI/2013, tertanggal 10 Juni 2013, Perihal: Laporan/ Pengaduan atas Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Drs.Jestor Sitorus, NIP.19571223.198603.1.002/157763 selaku Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bukti P-9A dan Bukti P-9B) maupun kepada Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana surat Kuasa Penggugat Nomor 031/Srt/VMH&R/VI/ 2013, tertanggal 10 Juni 2013, Perihal: Laporan/Pengaduan Atas Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Drs.Jestor Sitorus NIP. 19571223.198603.1.002/157763 selaku Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bukti P-10A dan Bukti P-10B);





22 Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka dalam rangka mempertahankan hak-haknya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

23 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menyatakan telah terjadi PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

24 Bahwa oleh karenanya menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak Majelis Hakim memutuskan perkara ini;

25 Bahwa konsekuensi yuridis dari PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat, yakni sebagai berikut:

- Uang Pesangon (Pasal 156 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003):

= 2 x 9 (sembilan) bulan upah;

= 2 x 9 x Rp3.050.000,00

= 18 x Rp3.050.000,00

= Rp54.900.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003):

= 6 (enam) bulan upah

= 6 x Rp3.050.000,00

= Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Uang Penggantian Hak (Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003):

= 15% x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja)

= 15% x (Rp54.900.000,00 + Rp18.300.000,00)

= 15% x Rp73.200.000,00

= Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Maka total Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak adalah sebesar Rp54.900.000,00 + Rp18.300.000,00 + Rp10.980.000,00.

= Rp84.180.000,00 (Delapan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Upah Proses sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/ PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang mewajibkan membayar Upah Proses selama terjadinya



perselisihan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar Upah Proses sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

26 Bahwa sedangkan hak normatif Penggugat atas Jamsostek atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan selama Penggugat bekerja pada Tergugat haruslah ditanggung oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus, sesuai dengan perhitungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebagaimana diatur dalam dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang dikutip sebagai berikut:

“(1) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut:

Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;

Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;

Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;

Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;

Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan.

b Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;

c Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;

d Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga;

2 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha;

3 Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja;

Hal. 11 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 4 Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Oleh karenanya perhitungan tanggungan Tergugat atas Jamsostek atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan selama Penggugat bekerja pada Tergugat ditambah dengan denda sebesar 2% per bulan sesuai dengan Pasal 47 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 adalah sebagai berikut:

A Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, dimana sesuai dengan angka 50 pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, termasuk dalam jenis usaha pada Kelompok III, maka besar Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,89% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, oleh karenanya perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja (0.89% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	November	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	April	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	September	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	November	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	April	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	September	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	November	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	September	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	November	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72

Hal. 13 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp12.691,03	Rp253,82	Rp12.944,85
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71

Hal. 15 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
			Total			Rp 3.143.003,77

B Perhitungan Jaminan Hari Tua yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3,7% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Hari Tua (3.7% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Hari Tua dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	September	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	November	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	April	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80

Hal. 17 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	September	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	November	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	September	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	November	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp52.760,45	Rp1.055,21	Rp53.815,66
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00

Hal. 19 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00

Hal. 21 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
			Total			Rp13.066.419,21

C Jaminan Kematian yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,30% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Kematian (0,30% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Kematian dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	September	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	November	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	April	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	September	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	November	1999			Rp49,92	

Hal. 23 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp832.000,00	Rp2.496,00		Rp2.545,92
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	September	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	November	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96

Hal. 25 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8,00			
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp4.277,87	Rp85,56	Rp4.363,43

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00

Hal. 27 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95

Hal. 29 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Mei	2010			Rp168,72	

Hal. 31 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.812.000,00	Rp8.436,00		Rp8.604,72
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	September	2011			Rp174,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.900.000,00	Rp8.700,00		Rp8.874,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Januari	2013			Rp183,00	

Hal. 33 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp3.050.000,00	Rp9.150,00		Rp9.333,00
			Total			Rp1.059.439,40

## D Perhitungan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebelum Penggugat menikah, yakni sejak Oktober 1997 sampai dengan Agustus 2008, dan sebesar 6% terhitung setelah Penggugat menikah sejak tanggal 30 Agustus 2008 sebagaimana Akta Nikah Nomor 57/GBI/MK/AN/30/08/2008, tertanggal 30 Agustus 2008 (Bukti P-11), sehingga perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

D.1 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebelum Penggugat menikah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (3% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	September	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	November	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	April	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	September	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	November	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	September	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	November	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50

Hal. 35 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp42.778,40	Rp855,57	Rp43.633,97
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
			Total			Rp6.000.274,85

Hal. 37 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.2 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan setelah Penggugat menikah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 6% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
2	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
3	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40

Hal. 39 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
4	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00



5	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
		Total				Rp9.188.237,52

Dengan demikian, maka jumlah keseluruhan Jamsostek atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan adalah sebagai berikut:

$Rp3.143.003,77 + Rp13.066.419,21 + Rp1.059.439,40 + (Rp6.000.274,85 + Rp9.188.237,52) = Rp32.457.374,75$  (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima rupiah);

27 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar Jamsostek atau Program Jaminan Sosial



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan, yakni dengan total keseluruhan sebesar Rp32.457.374,75 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan tersebut di atas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

28 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, yakni:

- Pabrik Tergugat yang terletak di Jalan Kebon Kosong I/24, RT. 015/RW. 01, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Pabrik Tergugat yang terletak di Jalan Rawa Selatan I Nomor 407, RT.009/RW.007, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Galur, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) unit mobil box Nomor Polisi B 9320 AA;
- 1 (satu) unit mobil box Nomor Polisi B 9148 ER;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nomor Polisi B 1266 PFG;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Dyna warna merah Nomor Polisi B 9258 PDA;

29 Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan;

30 Bahwa karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Provisi:

- 1 Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yakni tidak melaksanakan hak normatif Penggugat untuk mendapatkan Jamsostek atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan, maka sesuai dengan Pasal 86 jo. Pasal 96 serta Penjelasan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi:

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”;

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi:

- “(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh yang bersangkutan;
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;
- (4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/ atau tidak dapat digunakan upaya hukum”;

Penjelasan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi:

“Permintaan putusan sela disampaikan bersama-sama dengan materi gugatan”;

- 2 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, yakni tidak melaksanakan hak normatif Penggugat untuk mendapatkan Jamsostek atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan telah diperkuat dengan temuan Penyidik bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Surat Panggilan Nomor 029/SPS/I-VII/2013/PPNS-Sudin Nakertrans, tanggal 15 Juli 2013 (*vide* Bukti P-6), maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, berkenan untuk

Hal. 43 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar hak normatif Penggugat berupa Jamsostek atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan disertai dengan denda kepada Penggugat sesuai dengan perhitungan Penggugat tersebut di atas, yakni dengan total sebesar Rp32.457.374,75 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, di mana sesuai dengan angka 50 pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, termasuk dalam jenis usaha pada Kelompok III, maka besar Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,89% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, oleh karenanya perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja (0,89% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	November	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	April	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	September	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	November	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	April	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	September	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	November	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	September	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	November	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72

Hal. 45 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp12.691,03	Rp253,82	Rp12.944,85
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71

Hal. 47 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
			Total			Rp 3.143.003,77

B Perhitungan Jaminan Hari Tua yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3,7% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Hari Tua (3.7% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Hari Tua dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	September	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	November	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	April	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80

Hal. 49 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	September	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	November	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	September	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	November	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp52.760,45	Rp1.055,21	Rp53.815,66
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00

Hal. 51 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
			Total			Rp13.066.419,21

Hal. 53 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



C Jaminan Kematian yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,30% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Kematian (0.30% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Kematian dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
2	Agustus	1998			Rp38,22	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp637.000,00	Rp1.911,00		Rp1.949,22
	September	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	November	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	April	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	September	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	November	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92

Hal. 55 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	September	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	November	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00			
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Juli	2002			Rp77,57	

Hal. 57 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp1.292.798,00	Rp3.878,39		Rp3.955,96
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp4.277,87	Rp85,56	Rp4.363,43
11	Oktober	2003	Rp1.550.000	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00

Hal. 59 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Juni	2006			Rp135,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.250.000,00	Rp6.750,00		Rp6.885,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Oktober	2007			Rp144,45	

Hal. 61 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.407.500,00	Rp7.222,50		Rp7.366,95
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Februari	2009			Rp156,01	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.600.100,00	Rp7.800,30		Rp7.956,31
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72

Hal. 63 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00

Hal. 65 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Total			Rp1.059.439.40
--	--	--	-------	--	--	----------------

D Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebelum Penggugat menikah, yakni sejak Oktober 1997 s/d Agustus 2008, dan sebesar 6% terhitung setelah Penggugat menikah sejak tanggal 30 Agustus 2008 sebagaimana Akta Nikah Nomor 57/GBI/MK/AN/30/08/2008, tertanggal 30 Agustus 2008 (Bukti P-11), sehingga perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

D.1 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebelum Penggugat menikah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (3% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	September	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	November	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	April	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	September	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	November	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	September	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	November	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50

Hal. 67 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp42.778,40	Rp855,57	Rp43.633,97
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
			Total			Rp6.000.274,85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.2 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan setelah Penggugat menikah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 6% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
2	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Agustus	2009				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
3	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Desember	2010				

Hal. 71 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
4	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
		Total				Rp9.188.237,52

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas Jamsostek atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan disertai denda dengan total sebesar Rp32.457.374,75 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 73 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, di mana sesuai dengan angka 50 pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, termasuk dalam jenis usaha pada Kelompok III, maka besar Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,89% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, oleh karenanya perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja (0.89% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	November	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	April	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	September	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	November	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	April	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	September	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	November	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	September	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	November	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02

Hal. 75 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp12.691,03	Rp253,82	Rp12.944,85
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94

Hal. 77 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
			Total			Rp 3.143.003,77

B Perhitungan Jaminan Hari Tua yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3,7% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Hari Tua (3.7% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Hari Tua dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	September	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	November	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	April	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	September	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	November	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	September	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44

Hal. 79 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp52.760,45	Rp1.055,21	Rp53.815,66
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05

Hal. 81 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781.55	Rp90.859.05
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781.55	Rp90.859.05
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781.55	Rp90.859.05
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781.55	Rp90.859.05
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781.55	Rp90.859.05
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781.55	Rp90.859.05
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127.77
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
			Total			Rp13.066.419,21

C Jaminan Kematian yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,30% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Kematian (0.30% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Kematian dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00

Hal. 83 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	September	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	November	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	April	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	September	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	November	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juli	2000			Rp54,36	

Hal. 85 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp906.000,00	Rp2.718,00		Rp2.772,36
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	September	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	November	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96

Hal. 87 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp4.277,87	Rp85,56	Rp4.363,43
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
12	April	2004	Rp2.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Mei	2004	Rp2.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00

Hal. 89 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31

Hal. 91 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72

Hal. 93 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Mei	2012			Rp183,00	



			Rp3.050.000,00	Rp9.150,00		Rp9.333,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
		Total				Rp1.059.439,40

D Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebelum Penggugat menikah, yakni sejak Oktober 1997 sampai dengan Agustus 2008, dan sebesar 6% terhitung setelah Penggugat menikah sejak tanggal 30 Agustus 2008 sebagaimana Akta Nikah Nomor 57/ GBI/MK/AN/30/08/2008, tertanggal 30 Agustus 2008 (Bukti P-11), sehingga perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

D.1 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebelum Penggugat menikah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan
----	-------	-------	-----------	---------------------	----------	-----------------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pemeliharaan Kesehatan (3% x Upah/Gaji)		Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	September	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	November	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	April	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	September	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	November	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	September	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp42.778,40	Rp855,57	Rp43.633,97
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00

Hal. 97 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
			Total			Rp6.000.274,85

D.2 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan setelah Penggugat menikah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 6% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Februari	2009				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
2	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
3	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
4	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00

Hal. 101 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
5	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00



			Total			Rp9.188.237,52
--	--	--	-------	--	--	----------------

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum telah terjadi PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, yakni:

- Pabrik Tergugat yang terletak di Jalan Kebon Kosong I/24, RT.015/RW.01, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Pabrik Tergugat yang terletak di Jalan Rawa Selatan I Nomor 407, RT.009/RW.007, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Galur, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) unit mobil box Nomor Polisi B 9320 AA;
- 1 (satu) unit mobil box Nomor Polisi B 9148 ER;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nomor Polisi B 1266 PFG;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Dyna warna merah Nomor Polisi B 9258 PDA;

- 5 Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon ditambah dengan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Upah Proses dengan cara pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 103 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon (Pasal 156 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003):

= 2 x 9 (sembilan) bulan upah;

= 2 x 9 x Rp3.050.000,00

= 18 x Rp3.050.000,00

= Rp54.900.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Uang Penghargaan Masa Kerja {Pasal 156 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003}:

= 6 (enam) bulan upah;

= 6 x Rp3.050.000,00;

= Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Uang Penggantian Hak {Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003}:

= 15% x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja);

= 15% x (Rp54.900.000,00 + Rp18.300.000,00);

= 15% x Rp73.200.000,00.

= Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Maka total Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian

Hak adalah sebesar = Rp54.900.000,00 + Rp18.300.000,00 + Rp10.980.000,00.

= Rp84.180.000,00 (delapan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Upah Proses sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/ PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 yang mewajibkan membayar Upah Proses selama terjadinya perselisihan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar Upah Proses sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas Jaminan Sosial Tenaga kerja atau Program Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai denda dengan total sebesar Rp32.457.374,75 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh lima rupiah) di mana perhitungannya sebagai berikut:

- A Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, dimana sesuai dengan angka 50 pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, termasuk dalam jenis usaha pada Kelompok III, maka besar Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,89% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, oleh karenanya perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja (0.89% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	November	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	April	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp5.340,00	Rp106,80	Rp5.446,80
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	September	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	November	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
	April	1999	Rp637.000,00	Rp5.669,30	Rp113,39	Rp5.782,69
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06

Hal. 105 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
	September	1999	Rp770.000,00	Rp6.853,00	Rp137,06	Rp6.990,06
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	November	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp7.404,80	Rp148,10	Rp7.552,90
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
	September	2000	Rp906.000,00	Rp8.063,40	Rp161,27	Rp8.224,67
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	November	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp8.508,40	Rp170.168,00	Rp8.678,57
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp9.723,25	Rp194,47	Rp9.917,72
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp11.505,90	Rp230,12	Rp11.736,02
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp12.421,71	Rp248,43	Rp12.670,14
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp12.691,03	Rp253,82	Rp12.944,85
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp13.795,00	Rp275,90	Rp14.070,90
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp17.800,00	Rp356,00	Rp18.156,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80

Hal. 107 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp18.690,00	Rp373,80	Rp19.063,80
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp20.025,00	Rp400,50	Rp20.425,50
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp21.426,75	Rp428,54	Rp21.855,29
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp23.140,89	Rp462,82	Rp23.603,71
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp24.297,00	Rp485,94	Rp24.782,94
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp25.026,80	Rp500,54	Rp25.527,34
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp25.810,00	Rp516,20	Rp26.326,20
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp27.145,00	Rp542,90	Rp27.687,90

Hal. 109 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Total			Rp 3.143.003,77
--	--	--	-------	--	--	-----------------

B Perhitungan Jaminan Hari Tua yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3,7% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Hari Tua adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Hari Tua (3.7% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Hari Tua dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp22.200,00	Rp444,00	Rp22.644,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	September	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	November	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
	April	1999	Rp637.000,00	Rp23.569,00	Rp471,38	Rp24.040,38
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
	September	1999	Rp770.000,00	Rp28.490,00	Rp569,80	Rp29.059,80
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	November	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp30.784,00	Rp615,68	Rp31.399,68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	April	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
	September	2000	Rp906.000,00	Rp33.522,00	Rp670,44	Rp34.192,44
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	November	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp35.372,00	Rp707,44	Rp36.079,44
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp40.422,50	Rp808,45	Rp41.230,95
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp47.833,53	Rp956,67	Rp48.790,20
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp51.640,83	Rp1.032,82	Rp52.673,65





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp52.760,45	Rp1.055.21	Rp53.815.66
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp57.350,00	Rp1.147,00	Rp58.497,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp74.000,00	Rp1.480,00	Rp75.480,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp77.700,00	Rp1.554,00	Rp79.254,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp83.250,00	Rp1.665,00	Rp84.915,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp89.077,50	Rp1.781,55	Rp90.859,05
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp96.203,70	Rp1.924,07	Rp98.127,77
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp101.010,00	Rp2.020,20	Rp103.030,20
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88

Hal. 113 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp104.044,00	Rp2.080,88	Rp106.124,88
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp107.300,00	Rp2.146,00	Rp109.446,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp112.850,00	Rp2.257,00	Rp115.107,00
			Total			Rp13.066.419,21

C Jaminan Kematian yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 0,30% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga perhitungan Jaminan Kematian adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan	Denda 2%	Jumlah Jaminan
----	-------	-------	-----------	---------------------	----------	----------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				Kematian (0.30% x Upah/Gaji)		Kematian dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp1.800,00	Rp36,00	Rp1.836,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	September	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	November	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22

Hal. 115 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
	April	1999	Rp637.000,00	Rp1.911,00	Rp38,22	Rp1.949,22
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
	September	1999	Rp770.000,00	Rp2.310,00	Rp46,20	Rp2.356,20
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	November	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp2.496,00	Rp49,92	Rp2.545,92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			00			
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
	September	2000	Rp906.000,00	Rp2.718,00	Rp54,36	Rp2.772,36
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	November	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp2.868,00	Rp57,36	Rp2.925,36
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05

Hal. 117 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp3.277,50	Rp65,55	Rp3.343,05
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp3.878,39	Rp77,57	Rp3.955,96
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp4.187,09	Rp83,74	Rp4.270,83
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp4.277,87	Rp85,56	Rp4.363,43
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
	Februari	2004			Rp93,00	

Hal. 119 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp1.550.000,00	Rp4.650,00		Rp4.743,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp4.650,00	Rp93,00	Rp4.743,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp6.000,00	Rp120,00	Rp6.120,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp6.300,00	Rp126,00	Rp6.426,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00

Hal. 121 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp6.750,00	Rp135,00	Rp6.885,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp7.222,50	Rp144,45	Rp7.366,95



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp7.800,30	Rp156,01	Rp7.956,31
17	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Mei	2009	Rp2.730,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80

Hal. 123 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp8.190,00	Rp163,80	Rp8.353,80
18	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp8.436,00	Rp168,72	Rp8.604,72
19	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00

Hal. 125 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00			
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp8.700,00	Rp174,00	Rp8.874,00
20	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp9.150,00	Rp183,00	Rp9.333,00
			Total			Rp1.059.439,40

D Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebelum Penggugat menikah, yakni sejak Oktober 1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Agustus 2008, dan sebesar 6% terhitung setelah Penggugat menikah sejak tanggal 30 Agustus 2008 sebagaimana Akta Nikah Nomor 57/GBI/MK/AN/30/08/2008, tertanggal 30 Agustus 2008 (Bukti P-11), sehingga perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

D.1 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebelum Penggugat menikah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 3% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (3% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	Oktober	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	November	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Desember	1997	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Januari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Februari	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Maret	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	April	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Mei	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juni	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
	Juli	1998	Rp600.000,00	Rp18.000,00	Rp360,00	Rp18.360,00
2	Agustus	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	September	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Oktober	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	November	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Desember	1998	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Januari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Februari	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	Maret	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
	April	1999	Rp637.000,00	Rp19.110,00	Rp382,20	Rp19.492,20
3	Mei	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juni	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Juli	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	Agustus	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
	September	1999	Rp770.000,00	Rp23.100,00	Rp462,00	Rp23.562,00
4	Oktober	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	November	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20

Hal. 127 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember	1999	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Januari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Februari	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
	Maret	2000	Rp832.000,00	Rp24.960,00	Rp499,20	Rp25.459,20
5	April	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Mei	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juni	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Juli	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	Agustus	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
	September	2000	Rp906.000,00	Rp27.180,00	Rp543,60	Rp27.723,60
6	Oktober	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	November	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Desember	2000	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Januari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Februari	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
	Maret	2001	Rp956.000,00	Rp28.680,00	Rp573,60	Rp29.253,60
7	April	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Mei	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juni	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Juli	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Agustus	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	September	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Oktober	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	November	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Desember	2001	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Januari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Februari	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
	Maret	2002	Rp1.092.500,00	Rp32.775,00	Rp655,50	Rp33.430,50
8	April	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Mei	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juni	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Juli	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Agustus	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	September	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Oktober	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	November	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Desember	2002	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Januari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Februari	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	Maret	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
	April	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mei	2003	Rp1.292.798,00	Rp38.783,94	Rp775,68	Rp39.559,62
9	Juni	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Juli	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
	Agustus	2003	Rp1.395.698,00	Rp41.870,94	Rp837,42	Rp42.708,36
10	September	2003	Rp1.425.958,00	Rp42.778,40	Rp855,57	Rp43.633,97
11	Oktober	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	November	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Desember	2003	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Januari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Februari	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
	Maret	2004	Rp1.550.000,00	Rp46.500,00	Rp930,00	Rp47.430,00
12	April	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Mei	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juni	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Juli	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Agustus	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	September	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Oktober	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	November	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Desember	2004	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Januari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Februari	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	Maret	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
	April	2005	Rp2.000.000,00	Rp60.000,00	Rp1.200,00	Rp61.200,00
13	Mei	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Juni	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Juli	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Agustus	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	September	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Oktober	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	November	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Desember	2005	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Januari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Februari	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
	Maret	2006	Rp2.100.000,00	Rp63.000,00	Rp1.260,00	Rp64.260,00
14	April	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Mei	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juni	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Juli	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00

Hal. 129 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	September	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Oktober	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	November	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Desember	2006	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Januari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Februari	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	Maret	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
	April	2007	Rp2.250.000,00	Rp67.500,00	Rp1.350,00	Rp68.850,00
15	Mei	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juni	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Juli	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Agustus	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	September	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Oktober	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	November	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Desember	2007	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
	Januari	2008	Rp2.407.500,00	Rp72.225,00	Rp1.444,50	Rp73.669,50
16	Februari	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Maret	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	April	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Mei	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juni	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Juli	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
	Agustus	2008	Rp2.600.100,00	Rp78.003,00	Rp1.560,06	Rp79.563,06
			Total			Rp6.000.274,85

## D.2 Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan setelah Penggugat menikah

yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar 6% dari upah/gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya, yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Upah/Gaji	Perhitungan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (6% x Upah/Gaji)	Denda 2%	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam 1 (satu) bulan ditambah denda
1	September	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	November	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Desember	2008	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Januari	2009	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
	Februari	2009	Rp2.600.100,00	Rp156.006,00	Rp3.120,12	Rp159.126,12
2	Maret	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	April	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Mei	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juni	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Juli	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Agustus	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	September	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Oktober	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	November	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Desember	2009	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Januari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00

Hal. 131 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
	Maret	2010	Rp2.730.000,00	Rp163.800,00	Rp3.276,00	Rp167.076,00
3	April	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Mei	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Juni	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Juli	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Agustus	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	September	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Oktober	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	November	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Desember	2010	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Januari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Februari	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
	Maret	2011	Rp2.812.000,00	Rp168.720,00	Rp3.374,40	Rp172.094,40
4	April	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Mei	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,00	00		00
	Juni	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Juli	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Agustus	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	September	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Oktober	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	November	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Desember	2011	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Januari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Februari	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
	Maret	2012	Rp2.900.000,00	Rp174.000,00	Rp3.480,00	Rp177.480,00
5	April	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Mei	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juni	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Juli	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Agustus	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	September	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00

Hal. 133 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



			0,00	00		00
	Oktober	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	November	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Desember	2012	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
	Januari	2013	Rp3.050.000,00	Rp183.000,00	Rp3.660,00	Rp186.660,00
			Total			Rp9.188.237,52

- 7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali jika diakui dengan tegas kebenarannya;

A.1. Gugatan Terlalu Dini (Prematur).

- 1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan secara tegas bahwa gugatan yang diajukannya adalah Gugatan Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam bagian “Hal”nya. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami kutip bagian Hal, di halaman 1 yang berbunyi:

Hal: Gugatan Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

- 2 Bahwa bagian “Hal” di atas dipertegas juga oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 32, yang mengutip Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan:

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak”;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka adalah tidak diperkenankan melakukan penggabungan antara Gugatan Perselisihan Hak dan Gugatan PHK dalam satu gugatan yang sama;
- 4 Bahwa makna kata “wajib” sebagaimana yang disebutkan menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu keharusan, yang menginstruksikan secara tegas Pengadilan Negeri Hubungan Industrial agar (harus) memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak sebelum memutus Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 5 Bahwa dengan digabungkannya 2 (dua) hal Gugatan, yaitu Perselisihan Hak dan PHK oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Gugatan Penggugat menjadi prematur (terlalu dini), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 6 Bahwa ketentuan yang mewajibkan ditolaknya/ dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan

Hal. 135 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/PDT.Sus/2010 yang menyatakan:

“Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan dan perselisihan hak”;

dan juga Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 101 K/Sip/1974 yang menyatakan:

”Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya”;

## A.2. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuri Libelli*).

a. Menyatakan telah terjadi perselisihan hak, padahal faktanya belum pernah terjadi;

7 Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat yang menggugat masalah hak atas Jamsostek, dengan ini kami menolak gugatan tersebut dengan tegas karena selama ini belum pernah ada perselisihan hak (Jamsostek) antara Penggugat dan Tergugat;

8 Bahwa tidak berdasarnya Gugatan Penggugat atas Jamsostek tersebut adalah karena perselisihan hak (Jamsostek) belum pernah diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat. Karena perselisihan tersebut belum ada, maka tuntutan itu tidak bisa langsung diajukan gugatan perselisihan hak ke pengadilan, sebelum dilakukannya proses *bipartite* dan *tripartite* (penyelesaian melalui mediator). Bukti tidak adanya upaya bipartite dan mediasi dalam permasalahan Jamsostek ini sangat jelas, mengingat Penggugat tidak pernah melampirkan Risalah *Bipartite* dan atau Anjuran Mediator terkait dengan perselisihan Hak (Jamsostek);

9 Bahwa atas dasar penjelasan pada poin a dan b di atas, maka segala tuntutan Penggugat atas hak Jamsostek haruslah ditolak karena melanggar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004  
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial, khususnya Pasal 3, 4 dan 5;

b. Dalil-dalil antara poin-poin gugatan saling bertentangan.

10 Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diawali dari ketidakcocokan/cekcok antara Penggugat dengan seorang karyawan Tergugat yang bernama Yani (*vide*: gugatan Nomor 4). Dengan terjadinya cekcok tersebut Tergugat selaku pihak pemberi kerja memanggil Penggugat dan Yani untuk memberikan pengarahan agar dapat rukun dalam bekerja, sehingga dapat memberikan lingkungan harmonis di antara pekerja;

11 Bahwa di dalam gugatan Nomor 8 Penggugat mendalilkan pula tentang belum adanya kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat mengenai PHK. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip bunyi gugatan tersebut:

“Bahwa walaupun belum ada kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat mengenai PHK lisan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat beserta besarnya kompensasi PHK yang diterima oleh Penggugat....dan seterusnya”;

12 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka menjadi sangat tidak jelas maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, yang pada awalnya menyatakan dirinya telah di-PHK secara lisan oleh Tergugat (menurut pengakuan Penggugat), namun dalam gugatannya sendiri disebutkan bahwa belum ada kesepakatan PHK dengan Tergugat. Dalil tersebut sungguh tidak jelas dan tidak bersesuaian, bahkan membuktikan sendiri kalau Penggugat tidak pernah di-PHK oleh Tergugat;





13 Bahwa bukti tidak adanya PHK dari Tergugat sangat jelas dalam Gugatan Penggugat Nomor 9 yang menyebutkan bahwa Penggugat yang meminta surat PHK kepada Tergugat. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip gugatan tersebut:

“Bahwa ironisnya Tergugat justru bersikap arogan ketika Penggugat meminta surat PHK kepada Tergugat karena Tergugat tidak memberikan surat PHK tersebut...dan seterusnya”;

14 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas maka menjadi sangat jelas maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yakni meminta Tergugat mengeluarkan Surat PHK. Dalil tersebut sangat aneh karena Tergugat tidak pernah berkehendak melakukan PHK kepada Penggugat, melainkan Penggugat sendiri yang meminta kepada Tergugat untuk di-PHK agar mendapatkan sejumlah uang pesangon;

15 Bahwa tuntutan Penggugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;

Berdasarkan ketentuan di atas maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena gugatannya sangat tidak berdasar;

16 Bahwa dalil penolakan gugatan yang kabur sebagaimana jawaban tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 913 K/Pdt/1995 yang menyatakan:

“Memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*)”;

Dalam Rekonvensi:



- 1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi;
- 2 Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri secara hukum, Tergugat telah mengunci komputer dengan menggunakan *password* tertentu, sehingga komputer dan segala data terkait dengan perusahaan menjadi tidak bisa diakses sampai saat ini;
- 3 Bahwa Penggugat Konvensi telah berusaha meminta *password* tersebut, namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga memberikan *password* tersebut, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 4 Bahwa kerugian Penggugat Konvensi atas tindakan Tergugat tersebut timbul karena:
  - Penggugat tidak dapat menggunakan komputer;
  - Penggugat tidak dapat membuka dokumen-dokumen penting yang ada dalam komputer tersebut;
  - Akibatnya Penggugat harus mendata ulang keuangan dari awal;
  - Atas tindakan Penggugat yang tidak masuk kerja secara tiba-tiba, telah melumpuhkan karyawan yang bekerja dibawah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 5 Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi tidak masuk bekerja maka Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemanggilan secara patut, sebagaimana yang juga diakui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Gugatannya Nomor 17 dan 18. Namun oleh karena Tergugat Rekonvensi tetap tidak bekerja sekalipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan Pasal 168, pekerja dianggap telah mengundurkan diri;
- 6 Bahwa oleh karena pekerja telah mengundurkan diri, maka sudah sepatutnya pula statusnya diputuskan sebagai mengundurkan diri, yang tidak berhak mendapatkan pesangon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera memberikan *password*/kata sandi komputer milik Penggugat Rekonvensi/

Hal. 139 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi yang dipergunakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri secara hukum, sehingga tidak berhak mendapatkan pesangon;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 171/PHI/G/ 2013/PN.JKT.PST., tanggal 24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Konvensi yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atas perumahan serta pengobatan dan perawatan, kompensasi iuran Jaminan Hari Tua Program Jamsostek yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp65.678.920,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan dan menyerahkan *password* atau kata sandi untuk menjalankan komputer milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang pernah digunakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama melaksanakan pekerjaan di perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 24 Februari 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/ Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 April 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti memeriksa materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni Bagian pertama adalah Dalam Provisi dan bagian kedua Dalam Pokok Perkara, namun ternyata dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada satupun pertimbangan hukum yang mempertimbangkan mengenai tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahkan di dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak ada satupun Amar Putusan yang memutuskan tentang tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam provisi tersebut;
- 2 Bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti memeriksa jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaan dengan replik tertanggal 25 November 2013 karena jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdiri dari dua bagian, yakni

Hal. 141 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian pertama dalam eksepsi dan bagian kedua dalam pokok perkara, namun ternyata dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada satupun pertimbangan hukum yang mempertimbangkan tentang jawaban reconvensi terutama eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi tersebut bahkan di dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak ada satupun amar putusan yang memutuskan tentang eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi tersebut;

- 3 Bahwa padahal secara hukum kewajiban Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan memutuskan seluruh dalil-dalil dalam gugatan konvensi maupun jawaban dalam reconvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, bahkan dalam amar putusannya seharusnya pula secara tegas dinyatakan menerima atau menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar tata tertib beracara dan telah pula melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 178 HIR *jo.* Pasal 184 HIR *jo.* Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009") *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dikutip sebagai berikut: Pasal 178 HIR berbunyi:

- "(1) Dalam sidang permusyawaratan maka hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak;
  - 2 la wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dan tuntutan;
  - 3 la dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut";

Pasal 184 HIR berbunyi:

- "(1) Surat-surat putusan harus memuat secara ringkas tapi jelas isi gugatan dan jawaban-jawaban, begitu pula dasar-dasar putusan; selanjutnya dicantumkan apa yang ditentukan dalam ayat (4) Pasal 7 RO, dan akhirnya putusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan biaya-biayanya, begitu pula hal apakah pihak-pihak hadir pada waktu putusan itu diucapkan;
- 2 Dalam putusan yang didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disebut ketentuan perundang-undangan itu;
- 3 Surat-surat putusan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera";



Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan";

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

5 Bahwa oleh karenanya telah terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Dalam Konvensi:

1 Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah juga salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada alinea 4 dan alinea 5 pada halaman 127 Putusan dikaitkan dengan alinea 1 sampai dengan alinea 3 pada halaman 128 putusan yang dikutip sebagai berikut:

Alinea 4 dan alinea 5 pada halaman 127 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

"Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat fakta hukum, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh kedua belah pihak, demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang bernama Yani, sebelum perselisihan pemutusan hubungan kerja ini, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan teman kerjanya, yang merupakan bawahannya, yang bernama Yani; Perselisihan ini tidak menghasilkan penyelesaian yang baik bagi Penggugat dan Yani, namun berdampak bagi pekerjaan Penggugat, yakni dimutasi dari jabatannya dan pindah ke ruangan kerja yang berbeda dari sebelumnya" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat tindakan formal pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat mengakui Penggugat telah meminta Tergugat memberikan kompensasi PHK kepadanya. Tergugat juga mengakui pernah menawarkan uang penghargaan namun Penggugat menolaknya, karena jumlahnya tidak sesuai dengan harapan Penggugat";

Hal. 143 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





Alinea 1 s/ampai dengan alinea 3 pada halaman 128 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

"Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pemutusan hubungan kerja formal di antara yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun mutasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat sebagai jalan keluar atas perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan rekan kerjanya yang bernama Yani, telah dilakukan tanpa adanya bukti bahwa telah ada uraian kerja dan lingkungan kerja yang mendukung Penggugat untuk melakukannya dengan wajar. Sehingga meskipun Tergugat telah mengirim surat panggilan kerja kepada Penggugat, namun karena panggilan kerja tersebut untuk melakukan pekerjaan pada pekerjaan dan jabatan yang baru, salah satu alasan yang membuat Penggugat tidak bersedia melaksanakan pekerjaannya, surat panggilan tersebut tidak mendorong dan memotivasi Penggugat untuk kembali melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat tidak terbukti telah melakukan upaya untuk mempertahankan pekerjaannya, atau mengembalikan pekerjaan pada jabatan semula, selain menuntut kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja ini tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerjanya. Meskipun demikian karena kedua belah pihak sama-sama memiliki alasan yang berimbang untuk tidak melanjutkan hubungan kerja ini, Majelis Hakim berpendirian atas terjadinya pemutusan hubungan kerja ini Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat atau yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, dengn formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Formula tersebut terdiri dari uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

2 Bahwa adapun alasan-alasan yang membuktikan bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip tersebut di atas merupakan pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan kontradiksi antara satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa di satu sisi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya telah terjadi mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/



Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*vide* Pertimbangan Hukum Alinea ke-4 pada halaman 127 Putusan *jo.* Alinea ke-1 pada halaman 128 Putusan), sementara pada pertimbangan hukum Alinea ke-3 pada halaman 128 Putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa formula perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja adalah berdasarkan pada Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003");

- 2 Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tentang mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka konstruksi yuridis yang terbentuk adalah dengan terjadinya mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan terjadinya perpindahan jenis pekerjaan dan jabatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, padahal jabatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Bagian Administrasi *Finance* dan *Accounting* telah disepakati antara Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan selama hampir 15 (lima belas) tahun lamanya Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kesepakatan tentang jenis pekerjaan dan jabatan Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang selama ini telah terlaksana bahkan bertentangan dengan keahlian yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya telah terbukti bahwasanya Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memerintahkan atau mempekerjakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pekerjaan di luar jenis pekerjaan yang telah disepakati antara Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon

Hal. 145 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka seharusnya formulasi perhitungan kompensasi PHK yang tepat secara hukum adalah formulasi perhitungan kompensasi PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) huruf e dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dikutip sebagai berikut:

"(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau"

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

3 Bahwa ternyata di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak menggunakan dasar hukum Pasal 169 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai formula perhitungan Kompensasi PHK, namun justru Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan formula perhitungan Kompensasi PHK yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana Pertimbangan Hukum Alinea ke-3 pada halaman 128 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, padahal Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai relevansinya dengan Pertimbangan Hukum tentang mutasi karena Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang perhitungan Kompensasi PHK akibat PHK yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap buruh/karyawan karena tindakan buruh/karyawan termasuk dalam kategori ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya untuk menghindari kekeliruan, bersama ini Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengutip ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

"(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja



bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

4 Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

5 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (A)";

4 Bahwa dengan demikian telah terjadi kontradiksi antara Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang mutasi dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang formula perhitungan Kompensasi PHK yang didasarkan pada Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana hal tersebut berkontribusi bagi kerugian Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena berkurangnya jumlah Kompensasi PHK yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

3 Bahwa adapun Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Tuntutan Upah Proses sebagaimana Alinea ke-4 pada halaman 128 Putusan yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat mengenai uang proses sejak bulan Maret 2013 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ditolak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal sembilan belas bulan September tahun

Hal. 147 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



dua ribu sebelas, menentukan Penggugat berhak menerima upah dari Tergugat selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung hanya dalam keadaan Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya bekerja pada Tergugat. Dalam hal ini Penggugat sejak awal perselisihan terbukti tidak lagi bersedia bekerja selain menuntut kompensasi dari Tergugat";

4 Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang penolakan terhadap Tuntutan Upah Proses sebagaimana dikutip tersebut di atas merupakan Pertimbangan Hukum yang sangat keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa akibat mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membawa konsekuensi yuridis bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memerintahkan atau mempekerjakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar jenis pekerjaan dan jabatan yang telah disepakati bersama antara Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, maka seharusnya hubungan kerja antara Termohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih tetap berlangsung sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan berakhirnya hubungan kerja tersebut, sehingga seharusnya pula Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya, yakni membayar Upah Proses kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja pada tempat, jenis dan jabatan yang baru akibat tindakan mutasi yang menyebabkan terjadinya





perpindahan jenis pekerjaan dan jabatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, padahal jabatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Bagian Administrasi *Finance* dan *Accounting* telah disepakati antara Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan selama hampir 15 (lima belas) tahun lamanya Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kesepakatan tentang jenis pekerjaan dan jabatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- 2 Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara *a quo*, hal tersebut tercermin dalam Pertimbangan Hukum mengenai tuntutan Jamsostek sebagaimana Alinea ke-1 sampai dengan Alinea ke-3 pada halaman 129 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat atas kompensasi karena tidak diikutsertakan sebagai peserta Jamsostek. Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut. Tidak ada fakta bahwa Tergugat telah mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Jamsostek. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dalam Pasal 6 ayat (1) menentukan, ruang lingkup program Jamsostek terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Program tersebut memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, dan sakit sehingga membutuhkan pemeliharaan

Hal. 149 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawatan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1). Dalam hal ini Penggugat tidak atau belum meninggal dunia, tidak membuktikan adanya klaim kesehatan Penggugat yang tertunggak, tidak juga klaim kecelakaan kerja yang harus ditanggung oleh Tergugat. Berdasarkan hal ini tuntutan Penggugat atas kompensasi Jamsostek dalam program-program tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa satu-satunya program yang berhak diterima oleh Penggugat dalam bentuk uang dari PT.Jamsostek adalah manfaat hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pelanggaran terhadap ketentuan tidak diikutsertakannya Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Meskipun demikian karena Penggugat telah menuntut hak yang tidak diperoleh atas ketidakikutsertaan dalam Program Jamsostek dan juga ada itikad baik untuk membayar Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Penggugat (Bukti P-5.A, Bukti T-12), maka tuntutan ini beralasan hukum dikabulkan" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

6 Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan saling kontradiksi antara satu dengan yang lainnya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa di satu sisi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwasanya "Tidak ada fakta bahwa Tergugat telah mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta Jamsostek. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dalam Pasal 6 ayat (1) menentukan, ruang lingkup program Jamsostek terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan" (*vide* Alinea ke-1 pada halaman 129 putusan), namun pada pertimbangan hukum yang lain Majelis Hakim justru mempertimbangkan bahwasanya "...bahwa satu-satunya program yang berhak diterima oleh Penggugat dalam bentuk uang dari PT.Jamsostek adalah manfaat hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003" (*vide* Alinea ke-2 pada halaman 129 putusan), oleh karenanya dari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut justru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membangun konstruksi yuridis bahwasanya seolah-olah Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengikutsertakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek, sehingga yang dapat diklaim atau dituntut dalam bentuk uang dari PT.Jamsostek adalah Program Jaminan Hari Tua, sedangkan Program Jamsostek lainnya, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kematian seolah-olah tidak dapat dituntut dalam bentuk uang dari PT.Jamsostek karena belum terjadi peristiwa-peristiwa hukum, baik berupa kematian, kecelakaan kerja maupun karena klaim kesehatan yang tertunggak, padahal faktanya Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mendaftarkan/mengikutsertakan Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selama 15 (lima belas) tahun Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah mengenai tuntutan pencairan uang Jamsostek berupa pencairan uang Kecelakaan Kerja, pencairan uang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, pencairan uang Jaminan Kematian dan pencairan uang Jaminan Hari Tua dari PT.Jamsostek, namun yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tuntutan pembayaran uang Jamsostek berupa uang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan uang Jaminan Kematian serta uang Jaminan Hari Tua dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akibat tindakan Termohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mengikutsertakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek tersebut;

2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pun mengakui dengan tegas dalam pertimbangan hukumnya bahwasanya telah terbukti Termohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengikutsertakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek, sehingga sangat keliru bahkan kontradiksi dengan pertimbangan hukum lainnya yang menyatakan bahwasanya uang yang berhak diterima oleh

Hal. 151 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Program Jamsostek adalah uang Jaminan Hari Tua;

3 Bahwa dari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mengakui bahwa telah diperoleh fakta yuridis, yakni Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah tidak mengikutsertakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, maka secara hukum seharusnya Majelis Hakim mengabulkan seluruh Tuntutan/Petitum Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukannya hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan Jamsostek, yakni berupa pembayaran Uang Jaminan Hari Tua, hal tersebut adalah sesuai dan berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang dikutip sebagai berikut:

- "(1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara;
- (3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- (4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut;



(5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara" (garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

4 Bahwa selain itu ternyata dengan tidak diikutsertakannya Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena tujuan Program Jamsostek adalah memberikan perlindungan bagi pekerja, sehingga walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun Program Jamsostek tersebut akan terus berkelanjutan apabila Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja kembali di tempat kerja yang baru, di mana akibat tidak diikutsertakannya Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai uang Program Jamsostek, sehingga apabila Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja kembali di tempat kerja yang baru, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus didaftarkan kembali dalam Program Jamsostek dari awal dengan nominal uang Jamsostek dimulai dari nol, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang Program Jamsostek akibat tindakan Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tidak mengikutsertakan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Program Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selama 15 (lima belas) tahun Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan putusan yang keliru



dan telah terjadi kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahkan yang lebih fatal lagi ternyata dalam rangka menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan dasar hukum yang keliru pula, hal tersebut terbukti sebagaimana Alinea ke-2 pada halaman 129 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa satu-satunya program yang berhak diterima oleh Penggugat dalam bentuk uang dari PT.Jamsostek adalah manfaat hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003" (Garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

6 Bahwa padahal Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 justru sama sekali tidak ada korelasinya dengan Program Jamsostek termasuk hak Pekerja untuk menerima uang Jaminan Hari Tua dari PT.Jamsostek, oleh karenanya untuk mencegah kekeliruan, bersama ini Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengutip ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni sebagai berikut: Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

"(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan;

2 Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota;

3 Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota;

4 Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri";

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

"Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:

a Tersedianya tenaga kepelatihan;

b Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;

c Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan





d Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja";

7 Bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum Alinea ke-3 pada halaman 129 Putusan menggunakan dasar hukum yang keliru, yakni Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, padahal Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai korelasi dengan Program Jamsostek apalagi proses peradilan pidana tentang Jamsostek, oleh karenanya untuk mencegah kekeliruan, bersama ini Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengutip ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni sebagai berikut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

"Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan";

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

"Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri";

8 Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

7 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah juga salah menerapkan hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara *a quo* atau tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana tercermin pada Alinea ke-7 pada halaman 129 yang sambungannya pada halaman 130 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap barang-barang milik Tergugat, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka tuntutan tersebut ditolak";

Hal. 155 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





8 Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan yang keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum tersebut semakin membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* karena jikalau Majelis Hakim Tingkat Pertama cermat, teliti dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut didasari pada bukti-bukti yang kuat sebagaimana Bukti PK/TR-15A, Bukti PK/TR-15B dan Bukti PK/TR-16;
- 2 Bahwa oleh karenanya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menerapkan hukum pembuktian secara baik dan benar, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Bukti PK/TR-15A, Bukti PK/TR-15B, dan Bukti PK/TR-16 dalam menyatakan dikabulkan atau tidak dikabulkannya tuntutan/petitum gugatan konvensi tentang sita jaminan tersebut, namun dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah membangun konstruksi yuridis bahwa seolah-olah Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil mengajukan satupun bukti tentang harta-harta milik Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan tersebut, padahal berdasarkan Bukti PK/TR-15A, Bukti PK/TR-15B, dan Bukti PK/TR-16 tersebut, justru telah terang dan jelas membuktikan tentang kebenaran barang-barang milik Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dimohonkan sita jaminan tersebut, sehingga sangat tepat



dan benar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan/petitum Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang sita jaminan tersebut;

- 3 Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 171/PHI.G/ 2013/PN.JKT.PST., tanggal 24 Februari 2014 tersebut dan mengadili sendiri serta mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa adapun yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara *a quo* dalam rekonvensi adalah tercantum dalam halaman 130 sampai dengan halaman 131 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa di bagian rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, meskipun tidak lagi melaksanakan pekerjaannya, tidak menyerahkan pekerjaan terakhirnya dan juga tidak menyerahkan *password* atau kata sandi komputer yang digunakan selama melaksanakan pekerjaan di perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan *password* atau kata sandi komputer tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Majelis Hakim berpendirian, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pekerjaan dan menggunakan alat kerja milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena memiliki hubungan kerja

Hal. 157 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dengan demikian karena hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah putus dan berakhir, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib memberikan dan menyerahkan *password* atau kata sandi untuk menjalankan komputer milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang digunakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama melaksanakan pekerjaan di perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Berdasarkan pertimbangan ini maka pertitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai hal ini beralasan hukum untuk dikabulkan";

- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* karena apabila Majelis Hakim teliti dan tidak mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwasanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*), oleh karenanya bersama ini Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengutip kembali eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi, yakni:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur (*Obscur Libel*) Karena Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Jelas, Tidak Terang, Bahkan Terjadi Kontradiksi antara satu dalil Posita Gugatan Rekonvensi dengan dalil lainnya dalam Gugatan Rekonvensi;

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon agar dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam replik di atas diulang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam jawaban terhadap gugatan rekonvensi ini;
- 2 Bahwa dalil-dalil posita gugatan rekonvensi tidak jelas (kabur) karena dalam gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membedakan antara kualitas pihak dalam gugatan rekonvensi dengan pihak yang dalam gugatan konvensi, hal tersebut terbukti sebagaimana dalil Penggugat



Rekonvensi poin 3 dan poin 4 dalam gugatan rekonvensinya,  
yang dikutip sebagai berikut:

- "3. Bahwa Penggugat Konvensi telah berusaha meminta *password* tersebut, namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga memberikan *password* tersebut, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa kerugian Penggugat Konvensi atas tindakan Tergugat tersebut timbul karena:
- Penggugat tidak dapat menggunakan komputer;
- 3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka sangat tidak jelas bahkan kabur Gugatan Penggugat Rekonvensi karena di satu sisi Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwasanya Penggugat Konvensi *in casu* Tergugat Rekonvensi telah berusaha meminta *password* tersebut, namun setelah itu Penggugat Rekonvensi mendalilkan namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga memberikan *password* tersebut, sehingga sangat aneh apabila Penggugat Konvensi *in casu* Tergugat Rekonvensi meminta *password* dari dirinya sendiri dan Penggugat Konvensi *in casu* Tergugat Rekonvensi sendiri juga menolak atau tidak memberikan *password* yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi *in casu* Penggugat Konvensi sendiri, apalagi lebih anehnya lagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta *password* kepada dirinya sendiri, namun diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 4 Bahwa selain itu telah terjadi kontradiksi antara posita gugatan rekonvensi yang satu dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya karena di satu sisi Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi telah berusaha meminta *password*, namun sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi belum juga memberikan *password* tersebut, sehingga telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, namun di sisi yang lain pada dalil Penggugat Rekonvensi poin 4

Hal. 159 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



mendalikkan kerugian Penggugat Konvensi atas tindakan Tergugat tersebut timbul...", oleh karenanya telah terjadi kontradiksi antara satu posita Gugatan Rekonvensi dengan Posita Gugatan Rekonvensi lainnya, sehingga menimbulkan konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*);

- 5 Bahwa selain itu juga tidak jelas posita gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara terperinci berapa banyak unit komputer yang diganti *password* tersebut dan letaknya komputer yang diganti *password* tersebut di bagian mana pada kantor Penggugat Rekonvensi;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*), oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* menolak atau menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur (*Obscur Libel*) Karena Telah Terjadi Kontradiksi Antara Petitum Dengan Posita Gugatan.

- 1 Bahwa secara hukum petitum berisi permohonan/ permintaan yang disusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam bagian posita gugatan, sehingga apa yang ada dalam bagian petitum - harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian posita;
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:
  - 1 Bahwa dalam petitum poin 1 Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohon sebagai berikut:



"Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera memberikan *password*/kata sandi komputer milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dipergunakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi";

- 2 Bahwa sementara dalam posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi justru mendalilkan bahwasanya Penggugat Konvensi yang telah berusaha meminta *password* tersebut dari dirinya sendiri, dan atas permintaan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan *password* tersebut, bahkan yang dirugikan adalah Penggugat Konvensi *in casu* Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa oleh karenanya jikalau dalam posita gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa yang dirugikan atas dikuncinya *password* komputer tersebut dan tidak ada satupun usaha Penggugat Rekonvensi untuk meminta *password* dari Tergugat Rekonvensi, maka sangat bertentangan apabila petitum gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan *password*/kata sandi komputer milik Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa oleh karenanya telah terbukti di dalam Gugatan Penggugat telah terjadi pertentangan/kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan rekonvensi, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA-RI Nomor 1075 K/Sip/ 1980 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
- 4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka adalah tepat dan sesuai dengan hukum apabila

Hal. 161 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014





Mejelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- 5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

**Pokok Perkara:**

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian telah membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian secara baik dan benar karena ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada satupun bukti yang dapat menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;
- 2 Bahwa oleh karenanya terbukti bahwasanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pertimbangan hukum yang hanyalah didasarkan pada asumsi belaka atau setidaknya pertimbangan hukum dalam rekonvensi merupakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada hasil analisa Majelis Hakim terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi tanpa didasarkan pada fakta maupun bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara *a quo*;
- 3 Bahwa lebih fatal lagi ternyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil bantahan/ tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/



- Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi bahkan telah terbukti bahwasanya seluruh dalil-dalil jawaban rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara dalam rekonvensi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga telah terbukti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar tata tertib beracara pada peradilan perdata karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan asas peradilan secara berimbang (*fair trial*);
- 4 Bahwa padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim harus secara berimbang dalam melakukan pemeriksaan perkara, hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48/2009 *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999") *jo.* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang"

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

"(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak";

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

- 5 Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* secara berimbang dan tidak salah menerapkan hukum pembuktian, maka gugatan rekonvensi seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena ternyata Termohon

Hal. 163 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan adanya tuntutan tentang *password* komputer dari Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena selama proses *bipartite* maupun mediasi ternyata tidak ada satu surat pun yang ditujukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta atau memperingatkan agar Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan *password* komputer kepada Termohon Kasasi/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- 6 Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 171/ PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 24 Februari 2014 dan sebaliknya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah tepat karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran dan telah mendapat Surat Peringatan dari Tergugat yaitu berkenaan dengan perbuatan Penggugat terhadap bawahannya bernama Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ROSITA ULIS SORMIN, tersebut harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROSITA ULI SORMIN, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 oleh Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Horadin Saragih,S.H.,M.H., dan Dr.Fauzan,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Florensani Kendenan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr.Horadin Saragih,S.H.,M.H.

ttd/. Dr.Fauzan,S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd/. Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Florensani Kendenan,S.H.,M.H.

Hal. 165 dari 166 hal.Put.Nomor 479 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)